

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DAIRI**

JL. Pandu Kel. Bintang Hulu Kec. Sidikalang (Kode Pos) 22212
Telepon (0627) 21265, FAX (0627) 21265

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan kegiatan pada akhir periode pengukuran.

Selama tahun 2025, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada Tahun 2025. Keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama Tahun 2025. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam upaya peningkatan kinerja kedepan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara produktif, efektif dan efisien baik dari akses perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Sidikalang,

2026

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,



Fatimah Boang Manalu, S.Pd.SD, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730914 199611 2 001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Dairi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dengan Bupati Dairi Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

IKU OPD	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,395-0,399	0,38
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	17,84	17,79

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi melaksanakan program sesuai Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025 dengan uraian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.724.289.047,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.325.686.226,-
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 488.771.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 483.942.570,-
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan pagu anggaran sebesar Rp 153.829.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 148.387.745,-

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.342.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 10.031.032,-
5. Program Pengembangan Ekspor dengan pagu anggaran sebesar Rp 49.999.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,-
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 22.421.600,-
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp 745.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 0,-
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp 689.428.425,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 199.466.871,-

Alokasi anggaran dalam pencapaian target kinerja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 5.142.406.122,- dengan realisasi sebesar Rp 4.189.936.044,- atau 81,48%.

Sidikalang,

2026

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,



Fatimah Boang Manalu, S.Pd.SD, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730914 199611 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi merupakan organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Dairi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi yang diberi tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas dibantu Unit Pelaksana Teknis sebanyak 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis sesuai rincian tugasnya. UPT yang

ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah UPT. Metrologi Legal dan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2025 memiliki jumlah pegawai 33 orang dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 1.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki sangat jauh dibawah kebutuhan ideal perangkat daerah baik dari sisi kuantitas maupun kualifikasi pendidikan dan kompetensi. Sumber Daya Manusia yang ada terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 9 orang.

Tabel 1

Daftar Kualifikasi, Jumlah Pegawai dan Sumber Daya Manusia

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan			
	Laki-Laki	Perempuan	II	III	IV	V	IX	SMA	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
Kepala Dinas		1			1						1
Sekretariat	4	5	1	4	1	3		4	2	3	
Bidang Koperasi dan UKM	2	3		1	1	2	1	2		2	1
Bidang Perindustrian	0	2		1	1					1	1
Bidang Pengembangan Perdagangan	5	0		4	1			1		2	2
Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan	3	2		3	1		1			5	
UPT. Metrologi Legal	1	2		2		1		1		2	
UPT. PLUT	2	1		2		1		1		1	1
Jumlah ASN	17	16	1	17	6	7	2	9	2	16	6

Pada hakekatnya pembangunan Kabupaten Dairi ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan kebijakan program pengembangan industri, baik kecil dan menengah yang benar-benar dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Dengan demikian secara perlahan akan sangat bermanfaat pada pengentasan kemiskinan.

Potensi industri di Kabupaten Dairi cukup memadai, hal ini sejalan dengan perkembangan Kabupaten Dairi. Industri yang berkembang di Kabupaten Dairi dengan adanya potensi alam yang dimilikinya adalah industri hasil pertanian, perkebunan, hasil olahan hutan dan industri bahan bangunan dan hasil laut. Sedangkan industri lainnya yang berkembang adalah industri makanan dan industri untuk keperluan rumah tangga.

Industri Kecil dan Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Dairi pada umumnya masih dikelola secara tradisional baik teknis produksi, manajemen produksinya hingga manajemen pemasarannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengembangan peningkatan variabel-variabel produk untuk pengembangan produk dan pengembangan pasar tujuan produk.

Dalam rangka penerapan dan penguasaan teknologi industri kecil dan menengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang merupakan salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi daerah melakukan upaya-upaya baik bagi industri yang baru maupun yang sudah berkembang.

Upaya-upaya tersebut antara lain adalah usulan program-program untuk memberikan pelatihan teknologi produksi, penyuluhan dan studi banding, magang ke perusahaan yang telah maju diluar daerah, serta bantuan modal kerja dan peralatan bagi industri kecil dan menengah. Walaupun upaya-upaya tersebut akan membutuhkan kerja keras dan ketersediaan anggaran untuk bisa memberikan pergeseran ekonomi mikro di Wilayah Kabupaten Dairi. Alokasi anggaran Kabupaten Dairi belum mampu sepenuhnya untuk mencapai tujuan pembangunan di sektor ekonomi khususnya industri kecil dan menengah. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dituntut untuk melaksanakannya secara bersih dan transparan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pemerintah harus melibatkan semua unsur dan oknum yang terkait dalam pembangunan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Semangat otonomi daerah ini menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tuntutan atas pelaksanaan tugas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) terus meningkat. Oleh karenanya semua kegiatan pembangunan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sesuai dengan azas akuntabilitas yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir suatu kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

II. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja, perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan organisasi, antara lain :

1. Adaptasi atas Perubahan Lingkungan Strategis

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategis, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan Keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke Masa Depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah pengetahuan/ masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Perumusan Program Prioritas

Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan Prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

III. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan kondisi yang terjadi di wilayah Kabupaten Dairi dan memperhatikan isu strategis di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terdapat isu strategis yang perlu dikaji secara mendalam untuk dapat dilakukan penanganan dan sekaligus merespon segala kebutuhan masyarakat. Adapun isu strategis kondisi saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Industri

Hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah pada dasarnya merupakan salah satu implementasi dari kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah. Hilirisasi (industri hilir) merupakan aktivitas atau kegiatan pengolahan berbasis bahan baku sumber daya alam dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan menghindari ekspor sumber daya dalam bentuk primer (bahan mentah). Pengembangan hilirisasi industri diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan penguatan dan pengembangan struktur industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong perluasan wilayah industri, terciptanya alih teknologi serta meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi sub sektor ekonomi lainnya, Mengingat hal itu, maka kondisi potensi sumber daya alam, utamanya potensi produksi sumber daya alam terbarukan sebagai sumber daya bahan baku

industri merupakan landasan utama pentingnya hilirisasi industri pengolahan berkelanjutan.

Kabupaten Dairi sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dengan keragaman sumber daya hayatinya, khususnya sumber daya hayati berbasis komoditas pertanian dan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, serta komoditas perikanan, menjadikan hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah berbasis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung dan mendorong percepatan tujuan pembangunan khususnya dalam hal terwujudnya daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan terutama dalam upaya mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, menurunnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah (kontribusi industri pengolahan non migas).

Dengan demikian, hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah berbasis agro diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian kerakyatan berbasis sumber daya alam di Kabupaten Dairi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah Kabupaten Dairi diarahkan pada :

- a. Industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra – sentra produksi bahan baku serta lingkungan dan sarana penunjangnya.
- b. Penguatan dan meningkatkan kinerja industri pengolahan skala UKM/IKM yang didukung oleh industri pengolahan skala besar.
- c. Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah, peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja serta daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

Untuk itu, dalam rangka percepatan dan optimalisasi pencapaian tujuan hilirisasi, skala prioritas pengembangan hilirisasi industri pengolahan komoditas unggulan daerah Kabupaten Dairi menjadi sangat penting. Hal ini penting dilakukan dengan harapan hilirisasi industri pengolahan produk unggulan daerah dapat menjadi pendorong pengembangan industri agro berbasis komoditas unggulan daerah serta diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk agro, peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatnya

pendapatan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah Kabupaten Dairi secara berkelanjutan.

2) Bidang Perdagangan

Dalam upaya pengembangan perdagangan dan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah, ditemui berbagai permasalahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah :

1. Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama di daerah yang jauh dari ibukota kabupaten menjadikan kebutuhan pokok dan barang penting sebagian besar masih dipasok dari luar daerah yang berbatasan langsung.
2. Penataan PKL masih belum tertangani secara optimal.
3. Kurang lancarnya informasi harga dari kabupaten.
4. Masih ditemukan barang-barang yang beredar yang tidak layak jual dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI dan kadaluarsa.
5. Kurangnya SDM, sarana dan prasarana kemetrollogian.
6. Masih adanya disparitas harga menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.
7. Masih rendahnya pemanfaatan informasi /akses pasar luar negeri.
8. Terbatasnya kemampuan SDM UKM ekspor.
9. Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui.
10. Rendahnya daya saing pelaku usaha Kabupaten Dairi dengan daerah lain baik dari aspek kualitas komoditi maupun kuantitas.

3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Isu mendasar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pembagian urusan dimana salah satunya pembagian urusan koperasi dan UKM yang mengatur kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu lainnya seperti aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek pemasaran dan aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM). Permasalahan yang dihadapi di koperasi dan UKM Kabupaten Dairi antara lain :

1. Terbatasnya akses koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan.

2. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM baik dari segi kemasan, perijinan, kontinuitas atau kualitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.
3. Kurangnya kemampuan SDM koperasi dan UKM dalam penguasaan teknologi informasi mengakibatkan terlambatnya UKM dalam mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha.
4. Kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas mengingat salah satu persyaratan untuk tenaga pendamping adalah sarjana atau D3. Sedangkan di Kabupaten Dairi, kebanyakan sarjana/D3 masih berorientasi menjadi PNS atau karyawan perusahaan. Apalagi untuk pelaksanaan pendampingan di daerah terpencil dan perbatasan masih kurang dukungan ketersediaan SDM pendamping yang berkompeten.
5. Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya untuk mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi : rehabilitasi, re-organisasi dan pengembangan. Khusus Pelaksanaan rencana pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan *Online Data System*, Kementerian Koperasi mengalami kendala karena beberapa koperasi tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman program pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
6. Pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru yang meliputi pelaksanaan diklat, bantuan peralatan produksi dan pendampingan usaha masih mengalami beberapa kendala antara lain terbatasnya anggaran dan waktu diklat sehingga materi yang disampaikan belum dapat dikuasai dan dipraktekkan oleh peserta secara maksimal. Selain itu SDM UKM yang belum menguasai manajemen usaha dengan baik, menyebabkan usaha tidak dapat berkembang secara optimal. Untuk itu diperlukan juga adanya program pendampingan Wira Usaha Baru (WUB) agar diberikan alokasi anggaran yang mencukupi.
7. Terbatasnya kemampuan para pendamping dalam melakukan pendampingan koperasi dan UKM dalam beberapa aspek terutama dalam aspek teknis sehingga pengembangan usaha UMKM belum berjalan optimal.
8. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UKM dan koperasi

9. Masih banyak koperasi yang belum aktif melakukan RAT padahal kegiatan usaha koperasi berjalan aktif
10. Masih rendahnya pemahaman aparat yang membidangi pengawasan koperasi.
11. Cepatnya perpindahan/mutase aparatur
12. Rendahnya SDM dan tidak adanya Diklat Pengawas Koperasi bagi aparat.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi 2019-2024 terutama dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya koordinasi baik antar OPD maupun dengan jajaran kabupaten/kota, provinsi dan instansi vertikal (Kementerian dan Lembaga);
- b. Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah dalam pembangunan industri dan perdagangan;
- c. Database untuk industri dan perdagangan belum akurat dan perlu diperbaharui;
- d. Masih lemahnya penguasaan teknologi produksi IKM mendukung agribisnis;
- e. Komoditi perdagangan masih didominasi bahan baku;
- f. Pengembangan komoditi lokal pada industri unggulan;
- g. Peningkatan kualitas dan daya saing produk daerah untuk meraih proses ekspor;
- h. Pembangunan Pusat Distribusi dan Sentra Industri Kecil Menengah;
- i. Masih relatif rendahnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat;
- j. Masih terbatasnya kualitas maupun kuantitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal;
- k. Masih terbatasnya akses permodalan bagi koperasi;

- l. Masih lemahnya daya saing produk koperasi dan UMKM menghadapi persaingan;
- m. Lemahnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan usaha mikro.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

- a. Belum optimalnya standar mutu produk unggulan daerah, baik pertanian maupun produk UMKM yang berdaya saing sesuai permintaan pasar.
- b. Masih lemahnya jaringan pemasaran melalui sistem perdagangan digital.
- c. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha koperasi dan pelaku UMKM.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa tujuan dan sasaran disertai dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategis dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

2. Sasaran

Merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi

Adapun, tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut target tahunannya dapat dilihat pada Tabel II.1 dan Tabel II.2.

Tabel II.1

Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Kinerjanya

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mewujudkan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	LPE	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Kontribusi sektor industri
		Pengeluaran Perkapita Masyarakat Gini Rasio		Kontribusi sektor perdagangan

Tabel II.2

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						K	Rp	K	Rp	K
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	16 Persen	16 Persen	180.000.000	18 Persen	180.000.000	18 Persen
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi yang terlatih	0 Persen	16 Persen	175.000.000	18 Persen	180.800.000	18 Persen
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0 Satuan	0 Satuan	0	0 Satuan	0	0 Satuan
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM dengan peningkatan volume usaha	20 Persen	11 Persen	363.000.000	12 Persen	399.300.000	12 Persen

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						K	Rp	K	Rp	K
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM	0 Satuan	0 Satuan	0	0 Satuan	0	0 Satuan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar	9 Persen (1 Pasar)	27 Persen (1 Pasar)	449.032.760	37 Persen (1 Pasar)	493.936.036	37 Persen (1Pasar)
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase harga kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau	100 Persen	100 Persen	326.472.300	100 Persen	359.119.530	100 Persen
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi Perdagangan	5 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	350.000.000	15 Pelaku Usaha	375.000.000	15 Pelaku Usaha
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTP yang sudah tertib ukur	100 Persen	100 Persen	344.567.300	100 Persen	379.024.030	100 Persen

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
						K	Rp	K	Rp	K
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase kerjasama pemasaran produk lokal yang dijalankan	33 Persen (4 Kerjasama)	33 Persen (4 Kerjasama)	176.000.000	33 Persen (4 Kerjasama)	193.600.000	33 Persen (4 Kerjasama)
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipasarkan secara online	0 Persen	15 Persen	0	20 Persen	0	20 Persen
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat produksi dan kualitasnya	20 Persen	40 Persen	1.308.054.440	60 Persen	1.438.859.884	60 Persen
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang terfasilitasi permodalannya	20 Persen	20 Persen	0	20 Persen	0	20 Persen
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdata pada SIINas	20 Persen	40 Persen	50.000.000	50 Persen	55.000.000	50 Persen

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja perangkat daerah yang dituangkan dalam rencana strategis dapat dilihat pada Tabel II.3 dan Tabel II.4.

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja		Kondisi Akhir 2026
				2025	2026	
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,35	0,395-0,399	0,399-0,405	0,399-0,405
2	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	17,76	17,84	17,88	17,88

Tabel II.4
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja	
				2025	2026
	Urusan Koperasi dan UMKM				
1	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	unit	45	45	50
2	Jumlah koperasi sehat	unit	25	35	40
3	Jumlah usaha kecil menengah yang bertumbuh	unit	1.744	1.859	1.914
4	Jumlah UMKM yang terfasilitasi	unit	70	90	100
5	AKIP	nilai	B	63	67

NO	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja	
				2025	2026
	Urusan Perdagangan				
1	Pengembangan sistem perdagangan secara elektronik/e-commerce	sistem	1	1	1
2	Jumlah pasar yang representatif	pasar	9	10	11
3	Pengawasan penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar kemetrolgian	unit	600	600	600
4	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	unit	500	500	500
	Urusan Perindustrian				
1	Jumlah pameran/promosi produk daerah	pameran	12	12	12
2	Jumlah IKM yang tersertifikasi	IKM	16	20	22
3	Jumlah unit usaha IKM	unit	748	758	763
4	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	orang	100	110	120
5	Jumlah sentra IKM potensial	sentra	2	3	3
6	Jumlah IKM yang meningkat teknologi industrinya	IKM	10	12	12

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat program/kegiatan serta pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.724.289.047,-
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 488.771.000,-
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan pagu anggaran sebesar Rp 153.829.400,-
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.342.700,-
5. Program Pengembangan Ekspor dengan pagu anggaran sebesar Rp 49.999.750,-
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran sebesar Rp 25.000.000,-
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp 745.800,-
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp 689.428.425,-

Alokasi anggaran dalam pencapaian target kinerja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 5.142.406.122,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi ini masih banyak ditemukan berbagai hambatan. Hambatan utama yang ditemukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini adalah pengumpulan data kinerja yang ada pada bidang organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel III.1 dan Tabel III.2.

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi
Tahun 2025

IKU DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,395-0,399	0,38	97,4%
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	17,84	17,79	99,7%

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Urusan Koperasi dan UMKM				
1	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	unit	45	40	89%
2	Jumlah koperasi sehat	unit	35	35	100%
3	Jumlah usaha kecil menengah yang bertumbuh	unit	1.859	1050	56%
4	Jumlah UMKM yang terfasilitasi	unit	90	793	100%
5	AKIP	nilai	63	74,28	100%
	Urusan Perdagangan				
1	Pengembangan sistem perdagangan secara elektronik/e-commerce	sistem	1	0	0%
2	Jumlah pasar yang representatif	pasar	10	10	100%
3	Pengawasan penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar kemetrolagian	unit	600	42	7%
4	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	unit	500	274	55%
	Urusan Perindustrian				
1	Jumlah pameran/promosi produk daerah	pameran	12	8	67%
2	Jumlah IKM yang tersertifikasi	IKM	20	10	50%
3	Jumlah unit usaha IKM	unit	758	670	88%
4	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	orang	110	113	100%
5	Jumlah sentra IKM potensial	sentra	3	2	67%
6	Jumlah IKM yang meningkat teknologi industrinya	IKM	12	10	83%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	0,395%-0,399%	0,38%	97%	Jumlah pameran/promosi produk daerah	12 pameran	8 pameran	67%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	309.499.500	199.466.871
						jumlah IKM yang tersertifikasi	20 IKM	10 IKM	50%				
						Jumlah unit usaha industri kecil menengah (IKM)	758 unit	670 unit	88%				
						Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	110 orang	113 orang	100%		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	379.928.925	0
						jumlah sentra IKM potensial	3 sentra	2 sentra	67%				
						Jumlah IKM yang meningkat teknologi industrinya	12 IKM	5 IKM	42%				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Kontribusi Sektor Industri Perdagangan	17,88%	17,79%	99%	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	45 unit	40 unit	89%	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	488.771.000	483.942.570
						Jumlah koperasi sehat	35 unit	35 unit	100%				
						Jumlah usaha kecil menengah yang bertumbuh	1859 unit	1050 unit	56%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	6.450.000	5.770.000
						jumlah UMKM yang terfasilitasi	90 unit	793 unit	100%		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	147.379.400	142.617.745
						pengembangan sistem perdagangan secara elektronik/ e-commerce	1 sistem	0	0%	Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Lokal	49.999.750	0
						Jumlah pasar yang representatif	10 unit	10 unit	100%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	10.342.700	10.031.032

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		
										Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	745.800	0
						Pengawasan penggunaan alat UTP yang sesuai dengan standar kemetrolgian	600 pelaku usaha	42 pelaku usaha	7%	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.192.000	6.079.000
						jumlah alat UTP yang ditera/tera ulang	500 unit	274 unit	55%		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,, Tera Ulang	17.808.000	16.342.600
3	Meningkatnya Nilai AKIP	Predikat SAKIP	BB	BB	100%	Predikat SAKIP OPD	63	74,28 (BB)	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	456.631.330	337.234.639

REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Pagu Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Operasi			Realisasi Belanja Modal			Sisa Pagu
				Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	642.600.400	-	98,40%	98,40%	632.330.315	0,00%	0,00%	0	10.270.085
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	488.771.000	-	99,01%	99,01%	483.942.570	0,00%	0,00%	0	4.828.430
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	488.771.000	-	99,01%	99,01%	483.942.570	0,00%	0,00%	0	4.828.430
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	488.771.000	-	99,01%	99,01%	483.942.570	0,00%	0,00%	0	4.828.430
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	153.829.400	-	96,46%	96,46%	148.387.745	0,00%	0,00%	0	5.441.655
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	153.829.400	-	96,46%	96,46%	148.387.745	0,00%	0,00%	0	5.441.655
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	6.450.000	-	89,46%	89,46%	5.770.000	0,00%	0,00%	0	680.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	147.379.400	-	96,77%	96,77%	142.617.745	0,00%	0,00%	0	4.761.655

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Pagu Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Operasi			Realisasi Belanja Modal			Sisa Pagu
				Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.724.289.047	-	89,30%	89,30%	3.325.686.226	0,00%	0,00%	0	398.602.821
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.267.657.717	-	91,46%	91,46%	2.988.460.587	0,00%	0,00%	0	279.197.130
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.267.657.717	-	91,46%	91,46%	2.988.460.587	0,00%	0,00%	0	279.197.130
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.479.100	-	100,00%	100,00%	12.478.729	0,00%	0,00%	0	371
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.449.600	-	100,00%	100,00%	10.449.589	0,00%	0,00%	0	11
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.029.500	-	99,98%	99,98%	2.029.140	0,00%	0,00%	0	360
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.113.232	-	74,24%	74,24%	195.330.751	0,00%	0,00%	0	67.782.481
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.164.792	-	55,12%	55,12%	75.607.099	0,00%	0,00%	0	61.557.693
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.948.440	-	95,06%	95,06%	119.723.652	0,00%	0,00%	0	6.224.788
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.038.998	-	71,49%	71,49%	129.416.159	0,00%	0,00%	0	51.622.839
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.038.998	-	71,49%	71,49%	129.416.159	0,00%	0,00%	0	51.622.839
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.810.377.297	-	88,13%	88,13%	3.358.138.858	0,00%	0,00%	0	452.238.439
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	49.999.750	-	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	49.999.750
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi	49.999.750	-	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	49.999.750

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Pagu Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Operasi			Realisasi Belanja Modal			Sisa Pagu
				Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Pameran Dagang Lokal	49.999.750	-	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	49.999.750
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	10.342.700	-	96,99%	96,99%	10.031.032	0,00%	0,00%	0	311.668
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.342.700	-	96,99%	96,99%	10.031.032	0,00%	0,00%	0	311.668
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	10.342.700	-	96,99%	96,99%	10.031.032	0,00%	0,00%	0	311.668
3	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	25.000.000	-	89,69%	89,69%	22.421.600	0,00%	0,00%	0	2.578.400
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	25.000.000	-	89,69%	89,69%	22.421.600	0,00%	0,00%	0	2.578.400
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,, Tera Ulang	17.808.000	-	91,77%	91,77%	16.342.600	0,00%	0,00%	0	1.465.400
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.192.000	-	84,52%	84,52%	6.079.000	0,00%	0,00%	0	1.113.000
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	745.800	-	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	745.800
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	745.800	-	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	745.800

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Pagu Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Operasi			Realisasi Belanja Modal			Sisa Pagu
				Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	Rp	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	745.800	-	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	745.800
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	376.060.500	313.367.925	53,04%	53,04%	199.466.871	0,00%	0,00%	0	489.961.554
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	376.060.500	313.367.925	53,04%	53,04%	199.466.871	0,00%	0,00%	0	489.961.554
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	376.060.500	313.367.925	53,04%	53,04%	199.466.871	0,00%	0,00%	0	489.961.554
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	66.561.000	313.367.925	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	379.928.925
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	309.499.500	-	64,45%	64,45%	199.466.871	0,00%	0,00%	0	110.032.629
TOTAL		4.829.038.197	313.367.925	86,77%	86,77%	4.189.936.044	0,00%	0,00%	0	952.470.078

EVALUASI RENJA TA. 2025
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UHAHA KECIL DAN MENENGAH

EXCEL

RINGKASAN/IKHTISAR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Program/ kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang dilaksanakan pada Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.724.289.047,- dan realisasi sebesar Rp 3.325.686.226,- atau sebesar 89,30% dengan sisa anggaran sebesar Rp 398.602.821,-. Pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada program ini sudah optimal.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 488.771.000,- dan realisasi sebesar Rp 483.942.570,- atau sebesar 99,01% dengan sisa anggaran sebesar Rp 4.828.430,-. Pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada program ini sudah optimal.
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan pagu anggaran sebesar Rp 153.829.400,- dan realisasi sebesar Rp 148.387.745,- atau sebesar 96,46% dengan sisa anggaran sebesar Rp 5.441.655,-. Pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada program ini sudah optimal.
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.342.700,- dan realisasi sebesar Rp 10.031.032,- atau sebesar 96,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp 311.668,-. Pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada program ini sudah optimal.
5. Program Pengembangan Ekspor dengan pagu anggaran sebesar Rp 49.999.750,- penyerapan 0 atau sebesar 0% dengan sisa anggaran sebesar Rp 49.999.750,-. Program ini tidak terlaksana dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 22.421.600,- atau sebesar 89,69% dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.578.400,-. Pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada program ini sudah optimal.
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp.745.800,- penyerapan 0 atau sebesar 0% dengan sisa anggaran sebesar Rp 745.800,-. Program ini tidak terlaksana karena sudah dialihkan ke OPD Lain.
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp 689.428.425,- dan realisasi sebesar Rp 199.466.871,- atau

sebesar 28,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp 489.961.554,-.
Pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada program ini sudah optimal.

Berdasarkan data di atas, dari total pagu anggaran Rp 5.142.406.122,- dan realisasi sebesar Rp 4.189.936.044,- atau sebesar 81,487% dengan sisa anggaran sebesar Rp 952.470.078,-.

NO	ANGGARAN APBD	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Operasi	4.829.038.197	4.189.936.044	81,48%
2.	Belanja Modal	313.367.925	0	0%
Jumlah Total		5.142.406.122	4.189.936.044	81,48%

Lampiran II

Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program			Kegiatan			Anggaran	Realisasi
			Uraian	Sasaran	Indikator	Uraian	Sasaran	Indikator	(Rp)	(Rp)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) Dan Pemerintahan Yang Bersih (<i>Clean Government</i>)	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar	Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar	-Administrasi Umum Perangkat Daerah -Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP	456.631.330	337.234.639
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	IKM Yang Meningkatkan Produksi Dan Kualitasnya	Persentase IKM Yang Meningkatkan Produksi Dan Kualitasnya	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkat Produksi dan Kualitas IKM	Peningkatan Kapasitas SDM pelaku IKM	689.428.425	199.466.871
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Dipantau	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Dipantau	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan publikasi data harga barang pokok dan barang penting	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	10.342.700	10.031.032

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program			Kegiatan			Anggaran	Realisasi
			Uraian	Sasaran	Indikator	Uraian	Sasaran	Indikator	(Rp)	(Rp)
			Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pertumbuhan produk ekspor yang dihasilkan oleh UKM	Jumlah kemitraan antara pedagang kab.dairi dengan pengusaha di luar kab.dairi	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang	Persentase Produk Lokal yang dipasarkan keluar	49.999.750	0
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Alat UTTP Yang Sudah Tertib Ukur	Persentase Alat UTTP Yang Sudah Tertib Ukur	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTTP Yang Tera, Tera Ulang, dan diawasi	25.000.000	22.421.600
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya promosi/pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi dalam pelaksanaan promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	745.800	0
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	UMKM Dengan Peningkatan Volume Usaha	Persentase UMKM Dengan Peningkatan Volume Usaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Meningkatnya Persentase Volume Usaha UMKM	Persentase Wirausaha Baru	153.829.400	148.387.745

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program			Kegiatan			Anggaran	Realisasi
			Uraian	Sasaran	Indikator	Uraian	Sasaran	Indikator	(Rp)	(Rp)
						Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan/pengawasan terhadap koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT	488.771.000	483.942.570

PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

A. PERMASALAHAN

Bagian ini menyajikan gambaran analisis terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang mempengaruhi kinerja. Adapun permasalahan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keterkaitan usaha (kemitraan) koperasi dengan usaha lainnya.
2. Masih rendahnya animo masyarakat untuk ikut dalam Koperasi.
3. Belum optimalnya pengendalian koperasi yang tidak sesuai dengan aturannya.
4. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).
5. Masih rendahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat.
6. Masih rendahnya daya saing produk UMKM.
7. Belum optimalnya kerjasama usaha (kemitraan).
8. Kurangnya daya saing pemasaran produk IKM.
9. Kurangnya sarana dan prasarana produksi pelaku IKM untuk menciptakan produk berkualitas.
10. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengembangan industri/perusahaan.
11. Masih rendahnya kemitraan usaha industri/perusahaan.
12. Belum optimalnya kerja sama antara pasar dengan kelompok binaan pemerintah daerah.
13. Belum optimalnya cakupan pelayanan bina kelompok pedagang/usaha informal.
14. Penggunaan alat UTTP belum memenuhi standar kemetrolagian.
15. Belum adanya neraca perdagangan.
16. Belum optimalnya cakupan pelayanan informasi harga, komoditas, dan jenis produk.
17. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pasar.

B. SOLUSI YANG DILAKUKAN

Bagian ini menyajikan gambaran solusi yang dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Kabupaten Dairi. Adapun solusi yang dilakukan atas permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas produk unggulan daerah.
2. Optimalisasi akses dan distribusi barang pokok (33 jenis).
3. Regulasi terkait industri agribisnis.
4. Riset dan inovasi terkait industri agribisnis.
5. Tersedianya bahan baku untuk memperlancar proses produksi.
6. Peningkatan kapasitas Sosial Marketing dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
7. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM.
8. Peningkatan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dalam berwirausaha.

I. BIDANG KOPERASI

- PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS KDKMP (KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH)



➤ RAPAT ANGGOTA TAHUNAN



- **PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
- 1. PELATIHAN INJOURNEY HOSPITALITY HOUSE**



2. DAIRI CAMP PRENEUR



II. BIDANG PERINDUSTRIAN

➤ KEGIATAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK TENUN



III. BIDANG PERDAGANGAN

- PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI PASAR RAKYAT



➤ PENGAWASAN/ PENYULUHAN METROLOGI LEGAL (TERA, TERA ULANG) PADA PELAKU USAHA DI KAB. DAIRI



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Bupati Dairi telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi bersama - sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Perda.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data – data indikator secara umum masih dijumpai kekurangan dalam penyusunan LKIP ini untuk itu dimohon saran dan buah pikiran yang membangun untuk penyusunan yang lebih sempurna.
4. Diharapkan seluruh staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi bekerja secara maksimal untuk mewujudkan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan.

Sidikalang,

2026

Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Fatimah Boang Manalu, S.Pd.SD, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730914 199611 2 001